

RINGKASAN

Selama enam belas tahun, Indonesia telah menerapkan desentralisasi pemerintahan. Implementasi dari desentralisasi membuat masyarakat Indonesia bertanya tentang manfaat sesungguhnya dari desentralisasi ini dibandingkan dengan sistem tersentralisasi di masa lalu. DPRD sebagai dewan perwakilan rakyat seharusnya mewakili masyarakat dalam desentralisasi pemerintahan. DPRD ternyata melakukan tindakan oportunistik dengan menggunakan legislatif sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Agar masyarakat dapat secara nyata merasakan manfaat desentralisasi ini maka masyarakat perlu dilibatkan secara langsung dalam menentukan dan menyusun anggaran.

Penelitian ini berjudul “Analisis Penyerapan Hasil Musrenbang Tingkat Kabupaten Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun 2016”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi besarnya penyerapan hasil musrenbang tingkat kabupaten dalam APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2016 dan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penyerapan. Informan dalam penelitian ini adalah tujuh informan yang merupakan personel utama (*Key Informan*) dalam penyusunan APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2016 oleh dua informan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dua informan dari anggota DPRD, dan penyelenggara musrenbang Kabupaten Banyumas Tahun 2015 oleh tiga informan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selain itu penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa Peraturan daerah APBD, Peraturan daerah KUA&PPAS, Peraturan bupati RKPD, dan berita acara musrenbang.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan proses reduksi dan klasifikasi data menunjukkan bahwa besarnya penyerapan hasil musrenbang tingkat kabupaten dalam APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2016 sebesar 41,07% dengan kategori tidak efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tersebut adalah komitmen pimpinan daerah, kualitas usulan masyarakat, dan kemampuan keuangan daerah. Temuan utama lainnya adalah pelaksanaan *participatory budgeting* di Indonesia khususnya Kabupaten Banyumas berbeda jika dibandingkan dengan best practice yang berasal dari Brazil. *Municipal budget council* (Dewan Anggaran Kota) tidak ditemukan dalam proses *participatory budgeting* (musrenbang) di Indonesia yang berfungsi menjamin usulan musrenbang tidak tereduksi selama proses penyusunan dan proses pembahasan APBD.

Kata Kunci: Musrenbang, *Participatory Budgeting*, dan APBD

SUMMARY

More than sixteen years, Indonesia had implemented decentralization. Most of local residents are still questioning the real benefit of having decentralized government, instead of centralized system in the past. Municipal Council should be represent local residents in decentralized government. On the other hand, Municipal Council become opportunist which use their legislative authority to achieve individual interest. In order to make local residents achieve the real benefit of decentralization, local residents must be involved directly for government budgeting.

The title of this research: "The Analysis of Approved Proposed Budget in Municipal Meeting into Banyumas Sub national Budget, Year 2016". The objective of this research are to identify how much proposed budget in municipal meeting to be approved into Banyumas Sub national Budget, Year 2016 and to indentify which factor relevant to its approval. There are seven informants which 2 person from sub national budgeting team (TAPD), 2 person from municipal council, 3 person from sub national development and planning agency (Bappeda). In addition, this research also used data from local law act of sub national budgeting and proposed budget list in municipal meeting.

Based on the result, reduction technique, and data classification, This research show 41,07% Proposed Budget in Municipal Meeting to be approved into Banyumas Sub national Budget which categorized as not effective. Factor that relevant to the effectiveness are leadership commitment, quality of proposed budget, and budget free space availability. Another interesting issue, participatory budgeting (musrenbang) in Indonesia is different to the best practice that implemented in Brazil. In Indonesia, There is no Municipal budget council which responsible to make sure every Proposed Budget in Municipal Meeting to be approved into Sub national Budget.

Keywords: participatory budgeting, Sub national Budgeting, musrenbang, APBD